EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR:15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

(Skripsi)

Oleh

MARYA ANASTASYA PINEM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG

2017

ABSTRAK

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR:15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG".

Oleh
Marya Anastasya Pinem

Prostitusi adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita tersebut. Meningkatnya praktek prostitusi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat, di mana permasalahan prostusi tersebut menjadi penyebab keresahan masyarakat yang berada di lokasi praktek prostitusi tersebut berlangsung. Ditinjau dari permasalahan tersebut, pemererintah kota memutuskan untuk melakukan revisi pada peraturan daerah dengan harapan dapat menanggulangi permasalahan prostitusi di Kota Bandar Lampung. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung? Dan apakah faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota?

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perda dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan yang ada pada lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung. peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut berjalan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang masih belum terpenuhi dan mengalami beberapa hambatan seperti : Pelaksanaan Peraturan daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pelaku prostitusi atapun aktivitas prostitusi yang belum berkurang secara maksimal terlebih bila dilihat dari lamanya perda ini dikeluarkan. Dalam penggunaan sumber daya masih kurang maksimal oleh Instansi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dan sumber dana yang ada sudah seefisien mungkin digunakan untuk pembinaan walaupun tidak semua pelaku prostitusi dapat dibina. Kurangnya pengawasan dan sosialisasi, namun kecukupan pada metode yang digunakan untuk pembinaan sudah menunjukkan hasil seperti yang diharapkan pihak pelaksana pembinaan. Kemudian ketidak merataan mengenai sosialisasi, pengawasan, monitoring, maupun pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan peraturan daerah belum bisa dirasakan oleh semua kalangan baik masyarakat

maupun para penyandang masalah sosial tersebut. Respon para penyandang masalah sosial akan kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah akibat sosialisasi yang kurang maksimal. Peneliti menyimpulkan mengenai ketepatan yang dibagi menjadi tiga sub fokus oleh peneliti yaitu ketepatan dari fungsi perda, ketepatan pada penetapan target sasaran dan juga ketepatan pada manfaat perda. Pada ketepatan fungsi, target sasaran dan ketepatan manfaat sudah sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.

Saran dari penelitian ini adalah pemberian sanksi yang tegas bagi pelaku prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi, sosialisasi yang merata kesetiap sudut Kota Bandar Lampung, terutama yang banyak terdapat aktivitas prostitusi. Serta melakukan pengawasan dan monitoring yang berkesinambungan kesetiap individu maupun kelompok yang sudah diberikan pembinaan dan keterampilan melalui pendekatan kekeluargaan oleh Dianas Sosial Kota Bandar Lampung

Kata kunci : evaluasi, pelaksanaan, prostitusi

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR:15 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG

Oleh

Marya Anastasya Pinem

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ADMINISTRASI PUBLIK

Pada

Jurusan Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017

Judul Skripsi	: **EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR : 15 TAHUN 2012 TENTANG LARANGAN PERBUATAN PROSTITUSI DI KOTA BANDAR LAMPUNG**
Nama Mahasiswa	: *Marya Anastasya Pinem*
Nomor Pokok Mahasiswa	: 1016041059
Jurusan	: Ilmu Administrasi Negara
Fakultas	: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.
NIP 19810628 200501 1 003

2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara

Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua Penguji : **Simon Sumanjoyo H, S.A.N., M.PA.** .....

Penguji Utama : **Dr. Deddy Hermawan, S.Sos., M.Si.** .....

2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Dr. Syarief Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Desember 2017**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.

2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.

3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dari karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 27 Desember 2017
Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
12F3EAEF785804497
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Marya Anastasya Pinem
NPM. 1016041059

RIWAYAT HIDUP

Penulisbernamalengkap Marya Anastasya Pinem dilahirkan di Kota Medan padatanggal 16 Maret 1993 sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan dari pasangan Bapak Listra Manasye Pinem dan Ibu Roshany Sembiring.

Penulis memasuki pendidikan Taman KanakKanak (TK) PutriSion Medan padatahun 1997 dan lulus pada tahun 1998. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) Budi Murni II Medan pada tahun 1998 dan lulus pada tahun 2004. Penulis melanjutkan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Budi Murni II Medan pada tahun 2004 dan lulus pada tahun 2007. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 17 Medan dan lulus pada tahun 2010. Pada tahun 2010, penulis diterim asebagai mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung melalu ijalur UjianTertulis (SNMPTN) dan menyelesaikan Studi Strata Satu Administrasi Negara PadaTahun 2017 dengan gela rMarya Anastasya Pinem, S.AP.

Moto

Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan.
(Ps. Gideon Munthe)

Rajin tidak ada ruginya, tekun banyak untungnya. Tidak ada keberhasilan tanpa kedisplinan.
(Ps. Saksi Ginting)

Mengalah bukan berarti kalah, Mundur bukan berarti gagal, Beristirahat bukan berarti berhenti. Semua Indah Pada Waktunya.
(Peneliti)

PERSEMBAHAN

Terutama dari segalanya, rasa syukur ku kepada

TUHAN YESUS KRISTUS

karena anugerah dan kemurahan demi kemurahan yang Ia berikan akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat ingin ku bahagiakan, satu-satu nya alasan ku dalam menyelesaikan skripsi ini

Nande Biring ku dan Bapak Pinem ku

yang tercinta dan terkasih yang tidak dapat aku lukiskan dengan kata-kata bagaimana pengorbanan mereka mulai dari aku lahir hingga saat ini. Bagaimana sabarnya mereka menunggu janji ku menyelesaikan masa perkuliahanku. Tiada mungkin ku balas hanya dengan selembar kertas sebagai ungkapan terimakasihku ini tapi aku yakin kalian pun tau aku mmencintai kalian dan berusaha memberi yang tebaik untuk mamak dan bapak.

Dan Terimakasih Kepada

Almamater Tercinta

Universitas Lampung

SANWACANA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul **"Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Di Kota Bandar Lampung"** dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik di Universitas Lampung. Pada kesempatan penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini diantaranya :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Syarief Makhya, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Dr.Noverman Duadji, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Negara. Terimakasi Bapak atas motivasi yang telah diberikan kepada penulis di saat-saat penulis sedang berpacu dengan waktu untuk menyelesaikan masa studi penulis.
4. Bapak Simon Sumanjoyo H,S.A.N,M.PA., selaku pembimbing tunggal bagi penulis. Terimakasih Bapak atas motivasi, arahan, bimbingan dan terutama waktu yang telah diberikan kepada penulis. Seumur hidup penulis tidak akan pernah lupa atas kebaikan hati Bapak dalam membimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Dr.Deddy Hermawan,S.Sos, M.Si, selaku dosen pembahas. Terimakasih Bapak atas motivasi, waktu dan masukan-masukan yang Bapak berikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Meiliyana, S.IP.M.A., selaku dosen pembimbing pertama saat penulis mengajukan judul tapi harus digantikan karena beliau melanjutkan study ke luar negeri. Terimakasih ibu atas bimbingan dan perhatian yang Ibu berikan kepada penulis, akhir yang baik terjadi karena ada awal yang baik.
7. Bapak Syamsul Maarif, S.IP,M.Si., selaku dosen Pembimbing Akademik. Terimakasih Bapak atas waktu dan arahan yang selama ini Bapak berikan kepada penulis.
8. Seluruh dosen Jurusan Ilmu Administrasi Negara, terima kasih atas semua ilmu yang telah peneliti peroleh selama proses perkuliahan semoga dapat bermanfaat dan diamalkan dalam kehidupan peneliti kedepannya.
9. Ibu Nur dan Bapak Azhari yang sangat membantu penulis dalam pegurusan surat-menyurat, terimakasih Ibu dan Bapak atas waktu dan arahannya.
10. Seluruh pihak Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Masyarakat Kota Bandar Lampung yang telah memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian.
11. Kedua orang tua tersayang Bapak Listra Manasye Pinem dan Ibu Roshany Sembiring yang tiada hentinya menyayangi, medukung dan mendoakanku. Kasih sayang, cinta dan harapan kalian yang menjadi semangat ku dalam menyelesaikan skripsi ini. Aku tau bagaimana perjuangan mamak dan bapak dalam menjalani kehidupan ini. Aku bersyukur untuk cerita hidup yang kita jalani baik itu manis maupun pahit tapi sepahit apapun yang

kita alami terasa manis karena aku tahu kalian sangat menyayangiku. Mamak bapak maafkan aku menunda skripsi ku, itu karena aku sangat ingin membahagiakan kalian dan kalian tidak merasa gagal mendidikku. Terimakasi karena kalian sudah mau menunggu, mungkin bagi orang cara ku salah tapi aku yakin kalian adalah orang yang paling megerti aku. Ini hidup kita, kita yang jalani, bahagia selalu pak pinem dan nande biringku.

12. Teruntuk adikku tersayang, Immanuel si kurus kesayangan kakak, yang paling rajin bertanya kakak kapan wisuda, dan setiap dia bertanya menjadi motivasiku untuk menyelesaikan masa perkuliahan. Terimakasi sayangku untuk dukungan dan doa nya.
13. Bapak dan Ibu rohani ku beserta Keluarga ku dalam Tuhan GKII Bandar Lampung, Bapak Pdt. Saksi Ginting dan Ibu Mince Bangun yang sudah seperti orang tua ku sendiri, terimakasih atas doa-doa, cinta kasih dan dukungan yang Bapak Ibu berikan, aku bersyukur mempunyai Bapak Ibu Gembala yang luar biasa kasihnya dan aku sangat menyayangi bapak dan ibu.
14. Berthon Rifeldho Tampubolon, S.Pd yang sudah tujuh tahun hadir dalam hidupku, menjagaku di kota perantauan ini, yang sedang ada dalam doa ku dan aku pun ada dalam doa nya dan yang ku doakan menjadi teman hidupku nantinya terimakasih atas doa, kasih, dukungan, waktu, dan sudah menjadi alaram terbaikku untuk menyelesaikan skripsi ini. Satu langkah ku sudah selesai, langkah selanjutnya yang kita doakan siap untuk kita kerjakan.
15. Keluarga besar Sembiring Gurukinayan. Teruntuk Mama dan Mami ku terlebih bibik-bibik ku yang begitu banyak menolongku baik dengan memberikan kasih sayang, motivasi dan juga materi. Terimakasi Bi Uda, Bi Tengah Coky, Bi Tengah Ramon, Bi Tengah Kiki, Bi Tengah Wenny dan Bi Tua ku. Tak lupa terimakasih ku untuk Kakak ku

Kak Yana Manis dan keluarga yang banyak menolongku dan mengajari ku banyak hal beserta abang tua, abang tengah dan abang uda yang tidak dapat ku sebutkan satu persatu.

16. Keluarga besar Pinem. Bibik-bibikkku yang aku percaya mendoakan keberhasilanku, apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik bagi kita, untuk abang, kakak, adik dan ponakan yang tidak dapat aku sebutkan satu persatu.
17. Teruntuk adikku Agung Batara Tampubolon yang selalu ada dan banyak membantu ku di segala bidang, yang terkadang lebih dewasa kalau aku lagi menghadapi masalah, terimakasi ya dek untuk dukungan dan doanya. Tidak lupa untuk Bou "Yuk Anna" yang juga bisa aku rasakan kasihnya, adek yg super mandiri Parman Tampubolon beserta 'mpritnya Erna Nababan terimakasi untuk doa dan dukunganya.
18. Sahabat ku yang pernah ada, sekarang ada dan akan selalu ada Eituje, teruntuk sahabatku Almarhum Mei Yohana Tan yang selalu ku panggil Yoyo Cina yang pergi meninggalkan ku selamanya H+2 aku ujian skripsi (meja hijau), Mirna dan Billy terimakasih kalian masih ada sekarang ini, cerita bersama kalian membuat ku semangat dan tetaplah menjadi sahabat terbaikku. Iman , Terry, Jelita, Heny dan Frans doa ku untuk kalian juga.
19. Seluruh ANE angkatan 2010, Aduselon. Terkhusus Yulia Purba yang masih adadan medukungku sampai sekarang ini langgeng ama Thio nya ya, Datas yang rajin mengingatkan dateline skripsi, Abil yang banyak memberi informasi dalam mempersiapkan ujian skripsi, Pandu yang paling sering ngeledekin tapi jadi motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini serta sahabat seperjuangan di masa kuliah Rano, Mba Cay, Mamot dan Geng Subur Makmur.

20. Keluarga Besar Universitas Lampung yang telah membantu saya selama proses perkuliahan di Universitas Lampung.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan akan tetapi sedikit harapan semoga karya sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua. Amin

Penulis

Marya Anastasya Pinem

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL ……... **i**

HALAMAN PERSETUJUAN ……... **ii**

HALAMAN PENGESAHAN ……. **iii**

HALAMAN PERNYATAAN …… **iv**

RIWAYAT HIDUP …….. **v**

MOTTO ……. **vi**

HALAMAN PERSEMBAHAN ……. **vii**

SANWACANA…… …….. **viii**

DAFTAR ISI …….. **xiii**

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang …….....1

B. Rumusan masalah ……..……... 6

C. Tujuan ……...……..……. 6

D. Manfaat ….…….……..…… 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik …….…….. 8

1. Definisi Kebijakan Publik ……. 8

2. Tahap KebijakanPublik ……9

B. Tinjauan Evaluasi Kebijakan Kebijakan ……..…… 10

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan ……... 10

2. Tipe-tipe Evaluasi Kebijakan……...12

3. Jenis Evaluasi Kebijakan …… 13

4. Tujuan dan fungsi Evaluasi Kebijakan…… 14

5. Dimensi Evaluasi Kebijakan……15

6. Indikator Evaluasi Kebijakan…….....16

7. Evaluator Kebijakan……17

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah……18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan pendekatan penelitian…….…….. 24

B. Fokus Penelitian ……..……25

C. Lokasi Penelitian……26

D. Sumber Data…….. 26

E. Teknik Pengumpulan Data……27

F. Teknik Analisis Data…….. 28

G. Teknik Keabsahan Data……30

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung 32

B. Gambaran Umum Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung 43

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung 44

D. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja 52

BAB V PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 20002 55

1.1 Fokus 1 Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Daerah 55

1.2 Fokus 2 Efisiensi 58

1.3 Fokus 3 Kecukupan 61

1.4 Fokus 4 Pemerataan 63

1.5 Fokus 5 Responsivitas 65
1.6 Fokus 6 Ketepatan 67
2. Hambatan-hambatan Pelaksanaan Peraturan Daerah 68
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ……70
B. Saran ……..72
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

A.Latar Belakang

Prostitusi adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya,yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita tersebut Commemge (dalam Purnomo,1985:10). Prostitusi merupakan fenomena yang sudah lama ada di dunia bahkan dapat dikatakan bahwa prostitusi muncul sejak adanya peradaban manusia,engan kata lain masalah prostitusi seusia dengan peradaban manusia demikian juga upaya untuk menanggulanginya telah lama akan tetapi belum mampu menyelesaikannya dengan tuntas.

Beberapa lembaga seperti United Nations Development Programme (UNDP),Dinas Sosial,dan Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) mencatat bahwa jumlah PSK di Indonesia sekitar 193.000-272.000 (hizbut-tahrir.or.id diakses pada tanggal 13 Februari 2013) dan menurut Pusat Data dan Informasi CPNS Center terdapat sekitar 75.106 tempat pekerja seks komersial yang tersebar di Indonesia (ditjenpp.kemenkumham.go.id diakses pada tanggal 18 Agustus 2010) dan prostitusi kini cenderung meningkat dengan menyebarnya aktivitas wanita tunasusila/pekrja seks komersial.

Kota Bandar Lampung adalah salah satuu kota berkembang di Indonesia yang mengalami permasalahan prostitusi dan ini sudah ada cukup lama.Di kota ini banyak tempat yang menyediakan praktek prostitusi.Menurut pemantauan Dinas Sosial yang

dimuat dalam (mail-archive.com diakses pada tanggal 2 Desember 2004),daerah-daerah tempat prostitusi yang berada di Kota Bandar Lampung meliputi tempat – tempat hiburan,tempat mangkalnya para pelaku prostitusi seperti : Tanjungkarang Pusat,Jalan protocol (pada hotel-hotel melati),eks Pasa Seni Enggal,Panjang,Jalan Pramuka,Jalan Urip Sumoharjo,dan sepanjang Jalan Yos Sudarso serta daerah kawasan daerah Telukbetung.Sehingga pemerintah perlu menekan penyebaran bahkan menghentikan praktek prostitusi ini dengan berbagai cara dan salah satunya dengan membuat Peraturan Daerah.

Sebagai daerah otonom Pemerintah Kota Bandar Lampung berhak mengatur daerahnya sendiri. Salah satu hak pemerintah daerah sebagai daerah otonom ialah membentuk peraturan daerah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.Mengingat permasalahan prostitusi yang marak terjadi dan guna menekan penyebarannya,Pemerintah Kota Bandar Lampung mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi.Dalam peraturan daerah tersebut diatur larangan-larangan Perbuatan Prostitusi dan juga sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.Peraturan daerah ini sangat diperlukan Kota Bandar Lampung,karena seperti yang dikatakan di atas bahwa permasalahan prostitusi di Kota Bandar Lampung semakin lama semakin meningkat dan menyebar.

Meningkatnya praktek prostitusi tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat,di mana permasalahan prostusi tersebut menjadi penyebab keresahan masyarakat yang berada

di lokasi praktek prostitusi tersebut berlangsung.Praktek prostitusi ini mempengaruhi lingkungan sosisal masyarakat yang berada di lokasi tersebut dimana masyarakat yang tidak terlibat dalam perbuatan prostitusi ikut menanggung dampak negatif kegiatan prostitusi tersebut,contoh sederhananya,masyarakat harus membuat tulisan di pintu rumahnya dengan tulisan RUMAH TANGGA guna menghindari datangnya para tamu-tamu atau pelaku-pelaku prostitusi dan untuk menunjukkan bahwa di dalam rumah tersebut,anggota keluarganya tidak terlibat dalam perdagangan seks seperti kebanyakan rumah-rumah di sekitarnya (antarnews.com diakses pada tanggal 1 September 2012),belum lagi asumsi negative masyarakat terhadap daerah- daerah yang kerapkali menjadi tempat berlangsungnya praktek prostisusi yang membuat masyarakat yang tinggal di daerah tersebut di anggap menjadi bagian dari kegiatan tersebut.

Selain itu,hal yang lebih penting dari pengaruh kegiatan prostitusi tersebut adalah bagaimana perkembangan mental generasi muda kedepannya apabila masalah sosial pada masyarakat ini tidak segera dituntaskan.Disuatu media sosial online dilakukan wawancara antar wartawan dengan dua orang gadis yang masih belia, yang sekarang yang sekarag terjerumus kedalam dunia prostitusi, mengatakan bahwa mereka menjadi pelaku prostisusi karna terpengaruh orang-orang yang ada dilingkungan sekitarnya dan tergiur akan nilai ekonomi yang didapatkan dari kegitan tersebut.Bahkan,bagi mereka sekolah menjadi hal yang tidak penting karna mereka menganggap tanpa sekolah mereka dapat menghasilkan uang dengan menggeluti

pekerjaan di dunia prostitusi.Mereka bukan hanya dapat memenuhi kebutuhannya sehari-hari namun mereka juga dapat membeli barang-barang yang mereka inginkan dan mengikuti gya hidup yang ada di sekitar mereka. (antarnews.com diakses pada tanggal 1 september 2012).Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak di bawah umur yang ada di daerah lokasi tersebut juga sudah terpengaruh akan praktek prostitusi yang kerap berlangsung di sekitar mereka dengan mengabaikan nilai-nilai luhur dan agama mereka.

Peraturan Daerah telah dibuat sejak tahun 2002 dan berlaku sampai sekarang 2015,akan tetapi belum menunjukkan hasil yang maksimal.Apabila ditinjau dari waktu pembuatan praturan daerah tersebut , seharusnya permasalahan prostitusi di Kota Bandar Lampung ini diharapkan sudah dapat diatasi,seperti kota-kota lain yang usia peraturan daerahnya hampir sama bahkan lebih muda dari usia peraturan daerah Kota Bandar Lampung yang ada saat ini.

Praturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang larangan perbuatan prostitusi merupakan revisi dari Peraturan Daerah Nomor 5 Pada Tahun 1990’an tersebut,tepatnya pada era kepemimpinan Wali Kota Bandar Lampung Nurdin Muhayat,ada beberapa lokasi prostitusi yang diilegalkan dan resmi ditutup yaitu Pantai Harapan dan Pemandangan. Dengan penutupan lokalisasi tersebut diharapkan Kota Bandar Lampung bersih dari perbuatan prostitusi.Akan tetapi , sejak penutupan lokalisasi tersebut ,pelaku-pelaku prostitusi menjadi berkeliaran sampai ke keramaian kota dan tidak terkontrol lagi (repository.uinjkt.ac.id diakses pada tahun 2009)

Ditinjau dari permasalahan tersebut, pemererintah kota memutuskan untuk melakukan revisi pada peraturan daerah tersebut dengan harapan dapat menanggulangi permasalahan prostitusi di Kota Bandar Lampung.Peraturan daerah tersebut direvisi pada era pemerintahan Suharto sebagai Wali Kota Bandar Lampung.Akan tetapi sejak direvisinya peraturan daerah tersebut perkembangan praktek prostiusi di Kota Bandar Lampung bukan semakin menurun tetapi semakin meningkat, hal ini dapat diketahui dari meningkatnya jumlah penderita HIV/AIDS yang merupakan salah satu dampak dari perbuatan prostitusi. Adapun penyebab perkembangan penyakit HIV/AIDS yang paling utama lebih disebabkan hubungan seks bebas (pelacuran),meluasnya pekerja seks bebas yang masih beroprasi di tempat pelacuran dengan lokasi berpindah-pindah tentu berakibat meluasnya penularan penyakit kelamin dan sulitnya pengawasan.Tudingan prostitusi dianggap sebagai 80% faktor utama tentu beralasan karena pelaku seks bebas kini mengidap virus HIV/AIDS. Selain itu seperti yang telah dikatakan di atas,sekarang ini para pelaku seks bebas sudah secara terang-terangan menjajakan dirinya di jalan-jalan bukan hanya didaerah eks lokalisasi tetapi di tengah- tengah kota,dan hal ini dapat kita temui di Kota Bandar Lampung sekitar daerah Enggal, Yos Sudarso dan daerah lainnya saat larut malam (mail-archive.com diakses pada tanggal 2 Desember 2004).

Saat ini, para pelaku prostitusi bukan hanya perempuan yang sudah dewasa tetapi anak-anak dibawah umur juga sudah menjadi bagian dari praktek prostitusi,bahkan lebih berkembang lagi praktek prostitusi bukan hanya dapat ditemui dilokasi yang

kerap dijadiakan tempat berlangsungnya praktek prostusi,akan tetapi para pelaku prostitusi do Kota Bandar Lampung sudah mulai menggunakan media sosial dalam bertransaksi prostitusi dan ini sering dikatakan prostitusi online.Hal tersebut menunjukkan bahwa penyebaran perbuatan prostitusi di Kota Bandar Lampung semakin marak terjadi .

Berangkat dari permasalahan tersebut dan melihat betapa pentingnya permasalahan tersebut diselesaikan , penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor :15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung".

B.Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, tujuan dari penelitian ini secara umum adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota

D. Manfaat Penelitian

1. Secara akademis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memeperkaya wawasan dalam Ilmu Administrasi Negara, khususnya yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah.
2. Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan bagi segenap aparat dan Pemerintah Daerah Kota Bandar Lampung sebagai pelaksana Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

1. Definisi Kebijakan Publik

Secara sederhana kebijakan publik adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Definisi tersebut sejalan dengan pandangan Dye (dalam Wahab, 2008:4) yang mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan oleh pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut. Selain itu, menurut Riant Nugroho (2011:96) kebijakan publik dapat diartikan sebagai strategi untuk mengantar masyarakat pada masa awal, memasuki rnasyarakat pada masa transisi, untuk menuju masyarakat yang dicita-citakan.

Carl Friedrich (dalam Winarnc 2012:21) juga mengemukakan kebijakan public sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian kebijakan publik di atas, yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah suatu keputusan, pilihan, tindakan dan strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam usaha untuk mencapai tujuan dan sasaran serta membahas bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan

tersebut disusun dan didefinisikan, dan bagaimana semuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik.

2. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variable yang harus dikaji. Menurut Budi Winamo (2012: 35-37), tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

a. Tahap Penyusunan Agenda

Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Fonnulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai altematif atau pilihan yang ada.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak altematif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhimya salah satu dari altematif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus

diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan adminstrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan publik yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah. Kebijakan publik pada dasamya dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan.

Dari tahapan-tahapan kebijakan tersebut peneliti lebih memfokuskan pada tahap evaluasi kebijakan dikarenakan peneliti ingin melihat bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Prostitusi di Kota Bandar Lampung.

B. Tinjauan Tentang Evaluasi Kebijakan Publik

1. Pengertian Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi adalah penilaian atau pengukuran kebijakan termasuk isi, implementasi dan dampaknya. Menurut Jones (1984:199) evaluasi adalah kegiatan yang beitujuan untuk menilai manfaat suatu kebijakan). Evaluasi kebijakan pada dasamya harus bisa menjelaskan seberapa jauh kebijakan dan implementasinya telah dapat mendekati tujuan (Bryan dan White, 1987:198). Lester dan Stewart mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan *(eprints.uns.ac.id diakses pada tahun 2008)* dan evaluasi kebijakan ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah

dilaksanakan meraih dampak yang diinginkan. Selain itu, evaluasi kebijakan publik tidak hanya untuk melihat hasil *(outcomes)* atau dampak *(impacts),* akan tetapi dapat pula untuk melihat bagaimana proses implementasi suatu kebijakan dilaksanakan (Islamy, 2003:112).

Menurut Dunn (2003:608), istilah evaluasi dapat disampaikan dalam penaksiran *(appraisal),* pemberian angka *(rating),* dan penilaian *(assessment).* Evaluasi memainkan sejumlah fungsi utama dalam analisis kebijakan. Pertama, dan yang paling penting, evaluasi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yakni seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan yang telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kedua, evaluasi memberi sumbangan pada klarifikasi dan kritit terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Ketiga, evaluasi memberi sumbangan pada aplikasi metode-metode analisis kebijakan lainnya, termasuk perumusan masalah dan rekomendasi. Evaluasi dapat pula menyumbang pada revisi kebijakan dengan menunjukan bahwa alternatif kebijakan yang diunggulkan sebelumnya perlu dihapus dan diganti dengan yang lain.

Dari pengertian-pengertian yang dikemukakan oleh beberapa para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan publik adalah serangkaian usaha atau tindakan untuk melihat dan menilai secara keseluruhan, apakah kebijakan tersebut mengalami keberhasilan dan kegagalan dan untuk memutuskan apakah kebijakan tersebut dapat diteruskan atau dihentikan. Dalam tulisan ini, Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Prostitusi menjadi kajian dalam evaluasi kebijakan publik.

2. Tipe-Tipe Evaluasi Kebijakan Publik

James Anderson (dalam Winamo, 2008:229) membagi evaluasi kebijakan publik menjadi 3 (tiga) bagian:

a. Tipe pertama

Evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, dan tipe evaluasi ini dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri.

b. Tipe kedua

Evaluasi kebijakan yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu, dan tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program.

c. Tipe ketiga

Evaluasi kebijakan sistematis, tipe evaluasi ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai. Berdasarkan ketiga tipe evaluasi kebijakan publik di atas, tipe evaluasi yang paling sesuai dalam penelitian ini adalah tipe ketiga, yakni evaluasi kebijakan publik sistematis, karena peneliti ingin melihat sejauh mana pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung, dengan mencari tahu sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dan hambatan-hambatan yang ada selama pelaksanaan peraturan daerah tersebut.

3. Jenis Evaluasi Kebijakan Publik

Dalam buku Riant Nugroho (2011:676), Bingham dan Felbinger membagi evaluasi kebijakan menjadi empat jenis:

a. Evaluasi proses, yang berfokus pada bagaimana proses implementasi suatu kebijakan.
b. Evaluasi impalementasi yang berfokus pada hasil akhir suatu kebijakan.
c. Evaluasi kebijakan, yang menilai hasil kebijakan dengan tujuan yang direncanakan dalam kebijakan pada saat dirumuskan.
d. Meta-evaluasi, yang merupakan evaluasi terhadap berbagai hasil atau temuan evaluasi dari berbagai kebijakan terkait.

Dalam studi evaluasi, menurut Finsterbusch dan Motz (dalam Samodra dkk, 1994) dari sisi kualitas hasilnya terdapat empat jenis evaluasi yaitu:

a. *Single program after only*, merupakan jenis evaluasi yang melakukan pengukuran kondisi atau penilaian terhadap program setelah meneliti setiap variabel yang dijadikan kriteria program. Sehingga analis tidak mengetahui baik atau buruk respon kelompok sasaran terhadap program.
b. *Single program before-after*, merupakan penyempurnaan dari jenis pertama yaitu adanya data tentang sasaran program pada waktu sebelum dan setelah program berlangsung.
c. *Comperative after only*, merupakan penyempurnaan evaluasi kedua tapi tidak untuk yang pertama dan analis hanya melihat sisi keadaan sasaran bukan sasarannya.
d. *Comperative before-after*, merupakan kombinasi ketiga desain sehingga informasi yang diperoleh adalah efek program terhadap kelompok sasaran.

Dunn (dalam Nugroho, 2003:121) juga mengemukakan bahwa evaluasi dapat dikategorikan menurut timing yakni:

a. Evaluasi yang dilakukan sebelum implementasi kebijakan *(eavaiuasi summatif).*
b. Evaluasi pada waktu implementasi kebijakan *(evaluasi proses).*
c. Evaluasi sesudah implementasi kebijakan *(evaluasi konsekuensi).*

Artinya bahwa evaluasi terhadap kebijakan bukan hanya dapat dilakukan dalam proses implementasi saja, akan tetapi dapat juga dilakukan sebelum dan sesudah proses implementasi. Dalam penelitian ini evaluasi yang ingin dilakukan peneliti adalah evaluasi sesudah implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Prostitusi karena peraturan daerah tersebut sudah cukup lama dibentuk dan diimplementasikan.

4. Tujuan dan Fungsi Evaluasi Kebijakan Publik

Tujuan evaluasi kebijakan publik adalah

a. Mengukur efek suatu program/kebijakan pada kebidupan masyarakat dengan membandingkan kondisi antara sebelum dan sesudah adanya program/kebijakan tersebut. Mengukur efek menunjuk pada perlunya metodologi penelitian, sedang membandingkan efek dengan tujuan, mengharuskan penggunaan kriteria untuk mengukur keberhasilan.

b. Memperoleh informasi tentang kinerja implementasi kebijakan dan menilai kesesuaian dan perubahan program/kebijakan dengan rencana.
c. Memberikan umpan batik bagi manajemen dalam rangka perbaikan/

penyempurnaan implementasi.

d. Memberikan rekomendasi pada pembuat kebijakan untuk pembuatan keputusan lebih lanjut mengenai program/kebijakan di masa datang.

e. Sebagai bentuk pertanggung-jawaban publik atau memenuhi akuntabilitas publik.

Menurut Samodra, dkk (dalam Nugroho, 2003:186-187), fungsi evaluasi kebijakan publik adalah

a. Memberikan Eksplanasi yang logis atas realitas pelaksanaan sebuah program/ kebijakan. Untuk itu dalam studi evaluasi perlu dilakukan penelitian/kajian tentang hubungan kausal atau sebab akibat.

b. Mengukur Kepatuhan, yakni mampu melihat kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan

c. Melakukan Auditing untuk melihat apakah output kebijakan sampai pada sasaran yang dituju? Apakah ada kebocoran dan penyimpangan pada penggunaan anggaran, apakah ada penyimpangan tujuan program, dan pada pelaksanaan program?

d. Akunting untuk melihat dan mengukur akibat sosial ekonomi dari kebijakan. misalnya seberapa jauh program yang dimaksud mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, adakah dampak yang ditimbulkan telah sesuai dengan yang diharapkan, adakah dampak yang tak diharapkan.

5. Dimesi Evaluasi Kebijakan Publik

Secara garis besar ada dua dimensi penting yang harus diperoleh informasinya dari evaluasi kebijakan publik, dimensi tersebut adalah

1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan. Darinya kita akan memperoleh jawaban atau informasi mengenai kinerja implementasi, efektifltas dan efisiensi, dan lain sebagainya yang terkait.
2. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya. Darinya kita akan memperoleh informasi mengenai manfaat *(efek)* kebijakan, dampak *(outcome)* kebijakan, kesesuaian program/ kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan), dan lain-lain.

Pada penelitian ini kedua dimensi evaluasi kebijakan menjadi dimensi dalam memperoleh informasi, baik dari pencapaian kinerja pelaksana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dan juga tujuan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 yang telah dicapai sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

6. Indikator Evaluasi Kebijakan

William Dunn dalam bukunya Public Policy (1994: 610) menyebutkan ada 6 (enam) indikator yang digunakan untuk mengukur kriteria evaluasi kebijakan yaitu terdiri dari : efektivitas, efisiensi,kecukupan, pemerataan, responsivitas dan ketepatan. Sehingga kalau diuraikan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Efektivitas: tingkat capaian basil yang diinginkan
b. Efisiensi : tingkat usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
c. Kecukupan : tingkat capaian hasil dapat memecahkan persoalan.
d. Pemerataan : tingkat pemerataan distribusi biaya dan manfaat pada kelompok masyarakat yang berbeda

e. Responsivitas tingkat capaian hasil kebijakan dapat memuaskan preferensi/ nilai kelompok

f. Ketepatan : tingkat capaian hasil bermanfaat

Indikator-indikator di atas akan dijadikan indikator dalam mengukur mengukur kriteria evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Prostitusi di Kota Bandar Lampung.

7. Evaluator Kebijakan Publik

Evaluator adalah pelaksana evaluasi kebijakan publik dan ada tiga hal yang dapat dilakukan oleh seorang evaluator di dalam melakukan evaluasi kebijakan publik, yakni:

a. Evaluasi kebijakan mungkin menjelaskan keluaran-keluaran kebijakan, seperti misalnya pekerjaan, uang, mated yang diproduksi, dan pelayanan yang disediakan. Keluaran ini merupakan hasil yang nyata dari adanya kebijakan, namun tidak memberi makna sama sekali bagi seorang evaluator. Kategori yang lain menyangkut dampak yang dihasilkan oleh kebijakan publik terhadap kelompok-kelompok yang telah ditargetkan, atau keadaan yang ingin dihasilkan dari kebijakan publik. Pada saat seorang evaluator menganalisis konsekuensi-konsekuensi yang dihasilkan tersebut, maka seorang evaluator harus menjelaskan bagahnana kebijakan ditampilkan dalam hubungannnya dengan keadaan yang dituju.

b. Evaluasi kebijakan barangkali mengenai kemampuan kebijakan dalam memperbaiki masalah-masalah social

c. Evaluasi kebijakan barangkali menyangkut konsekuensi-konsekuensi

kebijakan dalam bentuk *policy feedback,* termasuk didalamnya adalah reaksi dari tindakan-tindakan pemerintah atau pernyataan dalam sistem pembuatan kebijakan atau dalam beberapa pembuat keputusan. Lester dan Stewart (dalam Winarno, 2002:170)

C. Tinjauan Tentang Peraturan Daerah

Peraturan daerah dibentuk dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah, yang dibentuk oleh pejabat-pejabat elit di daerah-daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Kepala Daerah baik di Propinsi maupun di Kabupaten/Kota. Peraturan daerah tersebut harus mengacu pada aturan hukum perundang-undangan di pusat dan disesuaikan dengan kebutuhan daerah bersangkutan.

Peraturan daerah ada dua bagian yaitu, peraturan daerah propinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 ayat 7, peraturan daerah propinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dengan persetujuan bersama Gubernur, dan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 1 ayat 8, peraturan daerah kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi dengan persetujuan bersama Bupati/Wali Kota Untuk merancang sebuah peraturan daerah, perancang pada dasaraya harus menyiapkan diri secara baik dan mengusai hal-hal sebagai berikut :

1) Analisa data tentang persoalan sosial yang akan diatur
2) Kemampuan teknis perundang-undangan
3) Pengetahuan teoiitis tentang pembentukan aturan
4) Hukum perundang-undangan baik secara umum maupun khusus tentang peraturan daerah (Ni'matul Huda, 2009:86)

Pembentukan peraturan daerah dapat berasal dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atau Gubemur, atau Bupati/Wali Kota masing-masing sebagai kepala daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. Rancangan peraturan daerah ini disampaikan oleh anggota, komisi gabungan komisi atau alat kelengkapan DPRD yang khusus menangani bidang legislasi. Rancangan peraturan daerah yang telah disampaikan oleh Gubemur atau Bupati/Wali Kota kepada DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota. Apabila dalam suatu masa sidang DPRD dan Gubemur atau Bupaati/Wali Kota menyampaikan rancangan peraturan daerah mengenai mated yang sama, yang dibahas adalah rancangan peraturan daerah yang disampaikan DPRD, sedangkan rancangan peraturan daerah yang disampaikan Gubernur atau Bupati/Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk persidangan (Widodo Ektajahjana, 2008:149).

Widodo Ekatjahjana (2008:19-20) mengemukakan bahwa landasan hukum perundang-undangan di daerah meliputi:

a. Landasan Politis

   Tertib perundang-undangan di daerah tergantung pada tertib ketatanegaraan kita yang berpuncak pada Undang-undang Dasar. Untuk menjamin

terlaksananya tertib pemerintahan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu dibagi atas daerah besar dan daerah kecil, baik yang bersifat otonom maupun yang bersifat administratif. Dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dalarn membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah atas dasar keutuhan negara kesatuan, diaralikan pada pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi

b. Landasan yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki dasar keabsahaan, baik yang bersifat formal maupun material. Keabsahan yang bersifat formal terkait dengan prosedur atau tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut dan keabsahan yang bersifat material terkait dengan materi muatan dalam suatu perturan perundang-undangan.

c. Landasan filosofis

Pembentukan peraturan perundang-undangan itu bertrtik tolak dari falsafah hidup bangsa. Falsafah hidup bangsa ini adalah Pancasila, Pancasila memuat sistem nilai kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti nilai ketuhanan, nilai-nilai humanisme, nilai-nilai nasionalisme, nilai-nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan, serta nilai keadiian sosial. Dari sistem nilai ini kemudian berkembang asas-asas hukum yang melandasi setiap pembentukan peraturan perundang-undangan berikut materi muatannya. Dengan demikian setiap

pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh lepas dari sistem ini.

Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi merupakan salah satu bentuk perundang-undangan daerah di Kota Bandar Lampung dan menjadi kajian peneliti.

D. Tinjauan Tentang Prostitusi

Prostitusi berasal dari Bahasa Latin yaitu *pro-stituere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, percabulan, dan pergendakan dan prostitusi itu ada pada semua negara dan sudah berkembang sejak zaman purba sampai sekarang dan senantiasa menjadi masalah sosial. Kartini Kartono (1992:207) mengemukakan, prostitusi merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu seks, dengan imbalan pembayaran, sedangkan Commemge (dalam Purnemo, 1985:10) mengemukakan prostitusi adalah suatu perbuatan seorang wanita memperdagangkan atau menjual tubuhnya, yang dilakukan untuk memperoleh bayaran dari laki-laki yang datang kepada wanita tersebut, yang biasanya dilakukan di lokalisasi, hotel dan tempat lainnya sesuai kesepakatan.

Secara etimologis prostitusi berasal dari bahasa Inggris yaitu *Prostitute/ prostitution* yang berarti pelacuran, perempuan jalang, atau hidup sebagai perempuan jalang, sedangkan dalam realita saat ini, menurut kaca mata orang awam prostitusi diartikan sebagai suatu perbuatan menjuai diri dengan memberi kenikmatan seksual pada kaum laki-laki. (Koentjoro, 2004:27).

Kartini Kartono (1992:209) juga menjabarkan definisi prostitusi/pelacuran sebagai berikut:

1. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan gejala jalan memperjualbelikan badan, kehormatan dan kepribadian banyak orang untuk memuaskan nafsu-nafsu seks dengan imbalan pembayaran.
2. Prostitusi adalah bentuk penyimpangan seksual, dengan pola-pola organisasi impuls/dorongan seks yang tidak wajar dan tidak teritegrasi dalam bentuk pelampiasan nafsu-nafsu seks tanpa kendali dengan banyak orang atau promiskuitas, disertai eksploitasi seks yang impersonal tanpa afeksi sifatnya.
3. Pelacuran ialah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Selanjutnya Kartini Kartono (1992: 232), menyebutkan beberapa peristiwa sosial yang menyebabkan aktivitas prostitusi, diantaranya sebagai berikut:

1. Tidak adanya Undang-undang yang melarang pelacuran juga tidak ada larangan terhadap orang-orang yang melakukan realisasi seks sebelum pernikahan atau diluar nikah.
2. Adanya keinginan dan dorongan manusia untuk menyalurkan kebutuhan seks, khususnya diluar ikatan perkawinan.
3. Komersialisasi dari seks, baik dipihak wanita maupun germo-germo maupun oknum-oknum yang memenfaatkan pelayanan prostitusi.
4. Dekadensi moral, merosotnya norma-norma susila dan keagamaan pada saat masyarakat mengaiami kesejahteraan hidup.
5. Semakin menurunnya penghormatan terhadap harkat dan martabat kaum

wanita sebagai manusia.

6. Kebudayaan eksploitasi pada zaman modern ini, khususnya mengeksploitir kaum lemah/wanita untuk tujuan-tujuan komersil.
7. Bertemunya bermacam-macam kebudayaan asing dan kebudayaan setempat di daerah-daerah perkotaan ibu kota, mengakibatkan perubahan-perubahan sosial yang cepat dan radikal, sehingga masyarakat menjadi instabil.

Berdasarkan penjelasan tentang prostitusi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa prostitusi/pelacuran adalah hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa terikat pernikahan yang sah dan perbuatan ini dipandang rendah dari sudut moral dan akhlak, dosa menurut agama, dan tercela serta prostitusi juga dianggap sebagai suatu bentuk piofesi dimana adanya perbuatan penjualan diri baik perempuan kepada laki-laki maupun laki-laki kepada perempuan dengan bayaran tertentu sesuai kesepakatan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif yaitu tipe penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena atau kejadian dengan apa adanya (Basrowi dan Suwandi, 2008:20). Hal tersebut didasarkan karena penelitian ini menghasilkan data-data berupa kata-kata tertulis dari data-data yang diperoleh dari sumber penelitian dengan tujuan untuk menggambarkan secara tepat mengenai suatu keadaan secara utuh.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yakni prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Bodgan dan Taylor (dalam Basrowi dan Suwandi, 2008:21) msngemukakan, metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara holistik sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi ke dalam variabel atau hipotesis tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari suatu keutuhan.

Dalam penelitian ini ditekankan pada metode kualitatif deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian non hipotesis yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan atau suatu fenomena. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif karena dalam penelitian ini statistika yang digunakan hanyalah statistika deskriptif bukan statiska inferensial dan data-data yang digunakan sebagai bahan untuk

menganalisis permasalahan dalam penelitian ini adalah data-data yang bersifat kualitatif. Apabila diperlukan data kuantitatif, hanyalah sebagai pelengkap atau pendukung untuk menguatkan data-data kualitatif yang ada.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian merupakan pedoman untuk mengambil data apa saja yang relevan dengan permasalahan penelitian. Fokus harus konsisten dengan permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan terlebih dahulu. Fokus penelitian juga berfungsi sebagai pedoman dalam melakukan pembahasan terhadap hasil penelitian yang teiah ditetapkan (Moleong, 2006:92). Perumusan fokus atau masalah dalam penelitian kualitatif ini bersifat tentantif artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu penelitian sudah berada di lapangan, babkan seringkali disamakan dengan masalah yang akan dirumuskan dan menjadi acuan dalam penentuan fokus penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti memfokuskan pada evaluasi pelaksanaan peraturan daerah, hambatan-hambatan dalam pelaksanaan perda dan upaya-upaya dalam mengatasi hambatan tersebut dengan mengacu pada dimensi-dimensi dalam evaluasi kebijakan.

1. Evaluasi kinerja pencapaian tujuan kebijakan, yakni mengevaluasi kinerja orang-orang yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan, sehingga dapat diperoleh jawaban atau infcrmasi mengenai implementasi Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi Kota Bandar Lampung.

2. Evaluasi kebijakan dan dampaknya, yakni mengevaluasi kebijakan itu sendiri serta kandungan programnya dan dapat diperoleh informasi mengenai manfaat *(efek)* kebijakan, dampak *(outcome)* kebijakan, kesesuaian program/kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapainya (kesesuaian antara sarana dan tujuan).

C. Lokasi Penelitian

Cara terbaik yang perlu ditempuh daiam penentuan lapangan penelitian ialah dengan cara mempertimbangkan teori subtantif dan dengan mempeiajari serta mendalami fokus serta rumusan masalah penelitian. Sementara itu, keterbatasan geografis dan praktis waktu. biaya, tenaga, perlu dipertunbangkan dalam penentuan lokasi penelitian. Dalam penelitian ini lokasi yang ditentukan adalah Kota Bandar Lampung. Alasan peneliti memilih lokasi ini adalah Kota Bandar Lampung merupakan objek dari Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi. Pertimbangan terhadap waktu, biaya, jarak dan tenaga juga menjadi faktor dominan yang menentukan lokasi penelitian ini.

D. Sumber Data

Menurut Lofland dalam (Basrowi dan Suwandi, 2008:169) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal ini, pada bagian ini jenis data dibagi ke dalam kata-kata, tindakan, sumber data tertuhs, foto, dan statistik. Data adalah bahan keterangan dalam suatu objek penelitian yang diperoleh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut data sekunder. Data sekunder dapat berupa naskah, dokumen resmi, dan sebagainya.

Data sekunder dalam penelitian ini berupa data dari Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dan Kesbangpol Provinsi Lampung.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara merupakan alat pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Tehnik wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara mendalam. Wawancara mendalam *(in-depth interview)* adalah pro.ses memperoleh keterangan unruk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini yang akan diwawancarai peneliti ialah aktor-aktor dan tokoh-tokoh yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi yaitu : Kepala Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, Humas Kesbangpol Provinsi Lampung, dan pelaku prostitusi.

2. Observasi

Beberapa informasi yang dipero'eh dari hasil observasi adalah ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau peristiwa, waktu, dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi adalah untuk menyajikan gambaran realistic perilaku atau kejadian, untuk menjawab pertanyaan, untuk membantu mengerti perilaku manusia, dan untuk evaluasi yaitu melakukan pengukuran terhadap aspek tertentu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. Observasi yang dapat digunakan dalam penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstraktur. Adapun observasi

yang peneliti lakukan yaiitu mengamati secara langsung kegiatan atau perilaku aktor-aktor yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor : 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi.

3. Dokumen

Sejumlah besar fakta dan data tersimpan dalam bahan yang berbentuk dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, cenderamata, laporan, artefak, foto, dan sebagainya. Dalam penelitia ini data-data dapat diperoleh dari dokumentaris negara seperti undang-undang, peraturan daerah, blog, dan lain-lain.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar (Paton dalam Basrowi, 2008:268). Analisa data merupakan bagian yang penting, maka data-data yang diperoleh meliputi data primer dan data sekunder akan diolah disusun secara kualitatif, setelah itu disajikan melalui proses yang dilakukan secara sistematis, metodologis dan konsisten, kemudian dianalisis dengan mengadakan data-data yang bersifat umum menjadi data-data yang bersifat khusus dan logis. Sedangkan Menurut Milles dan Hubennan (1992), analisis data pada penelitian kualitatif meliputi tahap-tahap sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemisahan, perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data yang diperoleh di lokasi penelitian

kemudian dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terrnci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya- Reduksi data berlangsung secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung. Laporan atau data di lapangan dituangkan dalam uraian lengkap dan terperinci. Dalam reduksi data peneliti dapat menyederhanakan data dalam bentuk ringkasan.

Dalam penelitian ini, reduksi data yang dilakukan peneliti yaitu memilah-milah data hasil wawancara, dan dokumentasi mana yang penting untuk digunakan dan mana yang tidak perlu digunakan sesuai dengan fokus penelitian sebelumnya yaitu evaluasi peraturan daerah no 15 tahun 2002 tentang larangan prostitusi di Kota Bandar Lampung, hambatan-hambatannya dan upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Oleh karena itu, peneliti melakukan reduksi data dari infonnasi yang telah didapat kemudian dirangkum dan difokuskan pada hal-hal yang penting untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

2. Penyajian Data

Penyajian dilakukan untuk memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dibatasi sebagai sekumpulan infonnasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam penelitian ini, penyajian data diwujudkan dalam bentuk uraian dan foto atau gambar sejenisnya. Akan tetapi, paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah teksnaratif.

3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan yaitu verifikasi secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu sejak awal peneliti memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisa dan mencari pola, tema, hubungan persamaan, hal-hal yang sering timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang tentatif. Data yang telah terkumpul akan diklasifikasikan dan diketahui gejalanya kemudian dihubungkan dengan teori yang ada dan dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung.

G. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan standar validitas dari data yang diperoleh. Dalam penelitian ini, peneliti memilih uji kredibilitasnya dengan metode *"Triangulasi"*. Menurut William Wiersma (dalam Sugiyono, 2009:273-275) mengemukan bahwa triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dari berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu.

1. Triangulasi Sumber, dengan menentukan pihak-pihak yang akan diwawancarai, tempat observasi dan sumber data dokumen yang dibutuhkan
2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data, didapat melalui wawancara, observasi dan dokumentasi
3. Triangulasi Waktu Pengumpulan Data, data ditenrukan kapan waktu seorangpeneliti melakukan penelitian baik pagi, siang maupun sore hari

Setelah dilakukan triangulasi, maka peneliti juga akan melakukan uji kredibiltas penelitian ini menggunakan pengujian yang bersifat "*Member'check*". *Membercheck* merupakan proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data (Sugiyono, 2009:276). Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh pemberi data (objek dalam penelitian ini) berarti datanya valid, sehingga dapat dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsiran tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data. Apabila perbedaanya tajam, maka peneliti harus mengubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh informan (pemberi data). Data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi yang didapatkan selama penelitian. Hasil wawancara kepada beberapa informan dicari kesimpulan bila kurang tepat berusaha mencari informan lainnya. Hasil wawancara disesuaikan dengan dokumentasi seperti peraturan yang ada serta observasi pengamatan langsung melalui foto di lapangan data tersebut akan dijadikan menjadi satu dan membuat kesimpulan.

BAB IV GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Kota Bandar Lampung

1. Visi dan Misi Kota Bandar Lampung

1.1 Visi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah sebuah kota di Indonesia sekaligus ibukota dan kota terbesar di Provinsi Lampung. Bandar Lampung juga merupakan kota terbesar dan terpadat ketiga di Pulau Sumatera setelah Medan dan Palembang menurut jumlah penduduk, serta termasuk salah satu kota besar di Indonesia dan Kota terpadat di luar pulau Jawa.

Secara administratif, Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah daratan 169,21 km² yang terbagi ke dalam 20 Kecamatan dan 126 Kelurahan dengan populasi penduduk 1.166.761 jiwa (berdasarkan data tahun 2015), kepadatan penduduk sekitar 8.316 jiwa/km² dan diproyeksikan jumlah penduduk mencapai 2,4 juta jiwa pada tahun 2030. Saat ini wilayah Kota Bandar Lampung dibagi menjadi 20 kecamatan :

1. Bumi Waras
2. Enggal
3. Kedamaian
4. Kedaton
5. Kemiling
6. Labuhan Ratu
7. Langkapura
8. Tanjung Karang Barat

9. Tanjung Karang Pusat
10. Tanjung Karang Timur
11. Tanjung Senang
12. Teluk Betung Barat
13. Teluk Betung Selatan
14. Teluk Betung Timur
15. Teluk Betung Utara
16. Panjang
17. Rajabasa
18. Sukabumi
19. Sukarame
20. Wayhalim

Secara geografis, Kota Bandar Lampung terletak pada 5^0 20’ sampai dengan 5^0 30’ lintang selatan dan 105^0 28’ sampai dengan 105^0 37’ bujur timur. Letak tersebut berada pada Teluk Lampung di ujung selatan pulau Sumatera. Kondisi ini membuat kota ini menjadi pintu gerbang utama pulau Sumatera, tepatnya kurang lebih 165 km sebelah barat laut Jakarta, memiliki andil penting dalam jalur transportasi darat dan aktivitas pendistribusian logistik dari Jawa menuju Sumatera maupun sebaliknya.

Saat ini kota Bandar Lampung merupakan pusat jasa, perdagangan, dan perekonomian di provinsi Lampung. Sehingga Kota Bandar Lampung memiliki prospek yang kuat untuk berkembang menjadi kota besar dalam skala regional, nasional, bahkan internasional. Potensi kota Bandar Lampung yang mendukung antara lain adalah

a) Lokasi geografis yang sangat strategis,

b) Kedudukan yang dituju dalam kebijaksanaan tingkat nasional dan regional,

c) Pemandangan alam yang indah yang dapat dimanfaatkan untuk menarik wisatawan,
d) Keanekaragaman suku bangsa (*multi ethnic*), dan
e) Dukungan wilayah sekitarnya (*hinterland*) yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan kota Bandar Lampung.

Ditinjau dari segi ekonomi, Kota Bandar Lampung memiliki peluang yang besar untuk memantapkan diri menjadi pusat perdagangan dan jasa pada skala Sumatera bagian Selatan. Sejalan dengan aktifitas ekspor-impor dan perdagangan antar-pulau, Bandar Lampung memiliki peluang untuk menjadi pusat perdagangan hasil pertanian dan industri dari Sumatera bagian Selatan maupun yang didatangkan dari daerah luar. *Hinterland* Bandar Lampung pada waktu ini telah berperan sebagai pemasok hasil perkebunan, peternakan dan perikanan yang diunggulkan, terutama komoditi gula, kopi, lada, kelapa, daging segar dan udang. Juga terlihat kecenderungan tumbuhnya kegiatan agroindustri menuju sentra agroindustri andalan di pulau Sumatera. Hal ini memberikan peluang bagi Bandar Lampung untuk menyediakan fasilitas perdagangan dan jasa bisnis seperti perbankan, perkantoran, dan sebagainya.

Sektor lainnya yang prospektif bagi Bandar Lampung adalah pariwisata, baik dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata di Sumatera bagian Selatan maupun mendayagunakan potensi keindahan alam Bandar Lampung. Pengembangan obyek wisata pantai dan laut serta perbukitan dalam kota Bandar Lampung menciptakan daya tarik bagi wisatawan mancanegara maupun

nusantara. Kelengkapan yang dapat dipersiapkan oleh Bandar Lampung adalah penyediaan prasarana dan jasa pariwisata seperti perhotelan, agen perjalanan, perbankan, dan infrastruktur pendukung lainnya

Hal ini mendorong Pemerintah Kota Bandar Lampung gencar melakukan pembangunan-pembangunan di Kota Bandar Lampung guna mencapai tujuan yang diinginkan yaitu masa depan yang lebih baik. Dalam rangka menetapkan tujuan pembangunan kota Bandar Lampung, diperlukan visi yang mengarahkan pandangan ke depan mengenai cita-cita kota yang disepakati bersama dan sebagai pedoman seluruh pihak yang terlibat dalam pembangunan kota, baik pemerintah kota, swasta, dan masyarakat (seluruh *stakeholders*) dalam memantapkan peran masing-masing dalam membangun Kota Bandar Lampung.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website resmi Kota Bandar Lampung, guna menyelaraskan seluruh aspirasi, langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif, maka ditetapkanlah Visi Pemerintah Kota Bandar Lampung yaitu :

"Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju, dan Modern".

Visi tersebut mengandung 5 (lima) unsur yaitu:

1. Aman

Suatu kondisi tercipta dan terjaganya keamanan dan ketertiban masyarakat baik dari gangguan manusia maupun dari gangguan alam, diukur dari menurunnya tingkat kriminalitas, minimnya tingkat gangguan baik keamanan dan ketertiban

dalam masyarakat, meningkatnya penegakan supremasi hukum serta meningkatnya adaptasi dan mitigasi terhadap resiko terjadinya bencana alam. Tujuan akhir dari visi ini adalah menciptakan kondisi yang aman untuk dihuni, aman untuk tempat bekerja dan suasana yang aman dan menarik untuk dikunjungi oleh pendatang.

2. Nyaman

Suatu kondisi yang memberikan keselarasan aspek sosial budaya, ekonomi serta lingkungan hidup dan tata ruang wilayah, diukur dari meningkatnya keselarasan dan konsistensi pemanfaatan tata ruang oleh masyarakat untuk peningkatan keselarasan antara manusia dan lingkungan serta meningkatnya kenyamanan wilayah kota untuk bermukim dan bekerja. Untuk mencapai visi Kota yang Nyaman, misi yang hendak diemban oleh kota Bandar Lampung adalah mampu menyediakan tempat tinggal yang berkualitas, sesuai serta terjangkau oleh kemampuan warga kota dan pendatang.

3. Sejahtera

Suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

4. Maju

Maju adalah kondisi masyarakat yang mampu dan cepat dapat menangkap dan menyesuaikan diri dengan berbagai perubahan baik di tataran lokal, nasional dan internasional. Hal ini ditandai dengan adanya kesiapan aparatur pemerintah kota dan masyarakat dalam merespon tuntutan dan perkembangan perubahan lingkungan internal maupun eksternal. Untuk mencapai kota yang maju, Bandar Lampung perlu meningkatkan diri untuk menciptakan kinerja pelayanan berkualitas internasional.

Perkembangan dunia telah menumbuhkan kriteria-kriteria baru dalam tingkat kemudahan bertransaksi, berkomunikasi dan penyelenggaraan transformasi usaha maupun aktifitas domestik. Kinerja pelayanan yang berkualitas dan kompetitif ditujukan untuk mendukung sektor-sektor yang akan bersaing dalam perekonomian dunia dan regional, serta berfungsi sebagai basis perkembangan kota Bandar Lampung. Disamping itu, kinerja pelayanan internasional ini juga ditujukan untuk mendukung kualitas kehidupan warga kota Bandar Lampung.

5. Modern

Modern adalah dimana kondisi ketersediaan infrastruktur perkotaan yang baik, teratur, aksesibel dan berkelanjutan dalam memberikan dukungan fungsi kota danpeningkatan daya saing basis perkotaan. Dalam konteks modern ini, juga mengarah kepada proses pergeseran sikap dan mentalitas pemerintahan maupun masyarakat untuk dapat hidup dan berperilaku sesuai tuntutan masa kini. Hal ini didasarkan atas fakta bahwa perekonomian dunia semakin menekankan pentingnya kompetisi dan keterbukaan yang mendorong perekonomian kota Bandar Lampung berhadapan langsung dengan jaringan dan sistem internasional.

Karena itu, Bandar Lampung harus mampu memilih dan mengembangkan sector perkotaan yang strategis sebagai basis perekonomian kota serta menyiapkan dan meningkatkan seluruh prasarana pendukung bagi sektor-sektor basis perkotaan.

1.2 Misi Kota Bandar Lampung

1. Mengembangkan Kota Bandar Lampung sebagai Pusat Jasa dan Perdagangan, Berbasis pada Ekonomi Kerakyatan
2. Meningkatkan Kualitas Pendidikan, Penguasaan Iptek dan Nilai-Nilai Ketaqwaan, Perkembangan Kreatifitas Seni dan Budaya serta Peningkatan Prestasi Olahraga.
3. Meningkatkan Pelayanan Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Masyarakat
4. Meningkatkan Pelayanan Publik dan Kinerja Birokrasi yang Bersih, Profesional, Berorientasi Kewirausahaan dan Bertata Kelola yang Baik.
5. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
6. Meningkatkan Daya Dukung Infrastruktur dengan Mengedepankan Penataan Wilayah, Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Wisata yang Maju dan Modern.

2. Kondisi Penduduk Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 memiliki jumlah penduduk sebanyak 891.374 jiwa. Jumlah penduduk tertinggi berada di Kecamatan Teluk Betung Selatan yaitu berjumlah 93.156 jiwa dengan luas wilayah 20,99 km2. Tingginya

jumlah penduduk di Kecamatan Teluk Betung Selatan dengan luas wilayah yang tidak terlalu besar tidak terlepas karena wilayah tersebut merupakan pusat pemerintahan dan perekonomian di Bandar Lampung, dicirikan dengan banyaknya gedung-gedung perkantoran dan bangunan pertokoan. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Tanjung Senang yaitu berjumlah 41.672 jiwa. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan tanjung senang yaitu berjumlah 16, 87 jiwa dengan luas wilayah 11, 63 jiwa, dimana kecamatan ini merupakan kecamatan yang baru berkembang. Kecamatan Tanjung Karang pusat merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk tertinggi yaitu 10.953 jiwa/km2, sedangkan Kecamatan Kemiling merupakan kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah yaitu 2.613jiwa/km2. Berikut jumlah penduduk Kota Bandar Lampung pada tahun 2011 disajikan dalam bentuk tabel :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung pada Tahun 2011

Kecamatan	**Jumlah Penduduk (jiwa)**	**Luas Wilayah (km2)**	**Kepadatan Penduduk (jiwa/km2)**
Teluk Betung Barat	60.041	20,99	2.860

Teluk Betung Selatan	93.156	10,07	9.251
Panjang	64.194	21,16	3.034
Teluk Betung Timur	90.295	21,11	4.277
Teluk Betung Utara	63.342	10,38	6.120
Tanjung Karang Pusat	73.169	6,68	10.953
Tanjung Karang Barat	64.439	15,14	4.256
Kemiling	72.248	27,65	2.613
Kedaton	89.273	10,88	8.205
Raja Basa	43.727	13,02	3.358
Tanjung Senang	41.672	11,63	3.583
Suka Rame	71.530	16,87	4.240
Sukabumi	64.288	11,64	5.523
Jumlah	**891.374**	**197,22**	**4. .520**

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, 2012

3. Kondisi Ekonomi Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung adalah ibu kota dari provinsi Lampung dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan dan kebudayaan. Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat kegiatan perekonomian daerah Lampung, letak kotapun sangat strategis karena merupakan daerah transit antar pulau sumatra dan jawa yang begitu memberi keuntungan bagi pertumbuhan danpengembangan kota Bandar Lampung.

Pemerintah Kota Bandar Lampung memanfaatkan letaknya strategis sebagai pengembangan perekonomian dengan memberi peluang kepada investor untuk menanam modal di Bandar Lampung, serta meningkatkan sumber daya manusia yang ada di daerahnya. Jumlah penduduk di kota Bandar Lampung pada sensus 2010 sebanyak 881.801 orang, dan dengan jumlah penduduk umur produktif umur 15 tahun keatas sebanyak 660.021 , dengan angka PDRB yang dihasilkan pada tahun 2012 sebesar 25,53 triliyun angka ini terus meningkat selama 5 tahun terakhir. Sektor yang memberikan kontribusi paling besar yaitu sektor industry pengolahan tanpa migas, yaitu sebesar 21, 89 persen.

Pemerintah kota Bandar Lampung sendiri dalam visi dan misinya menyatakan ” Terwujudnya Kota Bandar Lampung yang Aman, Nyaman, Sejahtera, Maju, dan Modern” di dalam poin kesejahtraan memiliki makna yang sejalan dengan penulisan ini yaitu:

Menciptakan suatu kondisi masyarakat yang lebih baik dan terus menerus diukur dari beberapa aspek yaitu meningkatnya taraf hidup masyarakat seimbang dengan pertumbuhan perekonomian wilayah. Hal ini ditandai dengan peningkatan usia harapan hidup, meningkatnya pendapatan perkapita dan daya beli masyarakat, meningkatnya kesempatan berusaha, berkurangnya jumlah penduduk miskin, meningkatnya angka partisipasi kasar dan murni di bidang pendidikan, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam upaya meningkatkan prekonomian, pemerintah daerah memiliki programprogram khusus yang bertujuan untuk menunjang kemajuan prekonomian, adapun program-progam pemerintah kota Bandar lampung adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan cara meningkatkan taraf pendidikan agar sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik serta menciptakan lapangan pekerjaan yang layak untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat.

4. Tingkat Kemiskinan di Kota Bandar Lampung

Kota Bandar Lampung terletak di wilayah yang strategis karena Provinsi merupakan daerah transit kegiatan perekonomian antar Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, sehingga menguntungkan bagi pertumbuhan dan pengembangan KotaBandar Lampung sebagai pusat perdagangan, industri dan pariwisata. Oleh karena itu tidak mengherankan jika banyak masyarakat dari luar kota Bandar Lampung yang mencoba peruntungan di kota. Hal ini menyebabkan semakin bertambahnya jumlah penduduk di Bandar Lampung, pertumbuhan yang tinggi tetapi tidak disertai dengan tingkat kesejahteraan yang baik menyebabkan banyak warga yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Berdasarkan data BPS Garis kemisikinan kota Bandar Lampung pada tahun 2012 mencapai 17 ribu jiwa dengan persentase 12,65. Berdasarkan presentase kemiskinan pada tabel diatas maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan di Bandar Lampung bukan yang tertinggi, namun sebagai daerah ibukota angka

presentase kemiskinan cukup memprihatinkan. Berikut data penyandangan masalah kesejahteraan Sosial termasuk jumlah fakir miskin di Kota Bandar Lampung yang mencapai 14.126 pada tahun 2014.

Tabel 2. Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Kota Bandar Lampung Tahun 2014

No	Jenis PMKS	Jumlah
1	Fakir miskin	14.126
2	Lansia Terlantar	2.386
3	Anak Disabilitas Anak Disabilitas	417
4	Gepeng dan Pemulung	356
5	Korban Bencana Alam	260
6	Bekas Warga Binaan LP	163
7	Koban Penyalahgunaan NAPZA	110
8	Anak Jalanan	72
9	Korban *Traficking*	10
10	Orang dengan HIV/AIDS	2
	Jumlah	**17.902**

Sumber: Data diolah berdasarkan data dari Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun 2014

B. Gambaran Umum Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung

Tidak dapat disangkal bahwa menjadi pekerja seks komersial (PSK) bukanlah sebuah cita-cita dan mungkin banyak orang menyebutnya sebagai penyimpangan moral seseorang. Berbicara masalah pelacuran sangat erat kaitannya dengan kesehatan reproduksi dan masalah ketimpangan sosial kaum perempuan. PSK berpenghasilan kecil dan dia harus melayani hubungan seksual dengan lebih banyak laki-laki setiap harinya untuk meningkatkan penghasilannya. Ada juga di antara mereka yang mungkin ingin menggunakan perlindungan, tetapi laki-laki

yang membayarnya akan merasa keberatan atas dasar alasan kenyamanan. Bahkan ada juga di antaranya menuntut seks di vagina atau anus tetapi menolak menggunakan kondom.

Karakteristik pekerja seks dari rentang usia sebanyak 53,33% berusia 18 - 25 tahun dan selebihnya berusia diatasnya dan dibawahnya yang masih tergolong anak-anak dibawah umur yaitu berusia kurang dari 18 tahun. Dari latar belakang pendidikan sebanyak 50% responden tamat SD/sederajat dan sebanyak 33,33% tamat SMP/sederajat. Sedangkan 16,67% selebihnya menyatakan Tidak Tamat SD atau buta huruf latin. Sebanyak 83,33% berstatus janda cerai hidup, 3,33% yang berstatus janda karena suaminya meninggal, dan 13,33% mengaku statusnya belum pernah menikah. Perilaku pekerja seks dari rata-rata melayani tamu antara 6 - 10 orang per-minggu, sebanyak 37% yang tahu manfaat menggunakan kondom saat berhubungan seksual, tetapi hanya 7% yang menggunakan kondom saat berhubungan antara 6-10 kali per-minggu.
(http://lampung.bkkbn.go.id pada tanggal 15 Mei 2009)

C. Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

1. Sejarah Terbentuknya Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung, telah berubah bentuk dan fungsinya. Untuk operasional pelaksanaan Perda tersebut, diatur rincian tugas masing-masing Jabatan Struktural di

LingkunganDinas Sosial Kota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Walikota Kepala Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 19 tahun

1998 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung Nomor 24 tahun 1996 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung. Dengan adanya Otonomi Daerah sejak tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Dinas Sosial Kota Daerah Tingkat II Bandar Lampung kemudian mengalami perubahan, yaitu berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 Tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung.

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Visi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah: “Mewujudkan kesejahteraan sosial oleh dan untuk semua menuju keadilan sosial masyarakat”. Misi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pelayanan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial.
2. Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) dan potensi sumber kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan partisipasi usaha kesejahteraan sosial masyarakat.
4. Meningkatkan pengarustamaan gender, kualitas hidup perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak.

3. Tujuan Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Tujuan pembangunan kesejahteraan sosial adalah terwujudnya tata kehidupan dan penghidupan yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan usaha dan memenuhi kebutuhan hidup, baik perorangan, keluarga, kelompok dan komunitas masyarakat dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia serta nilai sosial budaya yang tercermin dalam wujud:

1. Meningkat dan berkembangnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat.
2. Semakin meningkatnya prakarsa dan peran aktif masyarakat dalam usaha kesejahteraan sosial.
3. Semakin melembaganya usaha kesejahteraan sosial yang mampu menjangkau sasaran program yang lebih luas.
4. Terpelihara dan berkembangnya sistem nilai sosial budaya yang mendukug terlaksananya penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan.

Adapun dalam melaksanakan tugas pokok, Dinas Sosial mempunyai fungsi:

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang Kesejahteraan Sosial
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya, dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Letak Kantor Dinas Sosial Kota Bandar Lampung sangat strategis yaitu terletak di Jl. Panglima Polim No. 1 Kelurahan Gedung Air Kecematan Tanjung Karang Barat, yang termasuk jalan protokol. Didalam area dinas dilengkapi dengan kelaskelas untuk pembinaan bidang keahlian bagi penyandang masalah sosial.

4. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 30 tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bandar Lampung, disebutkan bahwa Susunan Organisasi Dinas Sosial Kota Bandar Lampung terdiri dari:

a) Kepala Dinas

b) Sekretariat, membawahi:

1. Sub Bagian Penyusunan Program, Monitoring dan Evaluasi
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Sub Bagian Keuangan

c) Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahi:

1. Seksi Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Kelembagaan Sosial dan Kemitraan
2. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial
3. Seksi Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kejuangan

d) Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, membawahi:

Bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial, meliputi

pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial dan pelayanan dan rehabilitasi sosial korban narkoba.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, bidang pelayanan dan rehabilitasi social mempunyai fungsi:

1. Perumusan teknis kebijaksanaan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
2. Penetapan kriteria dan prosedur pelayanan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi social narkoba.
3. Pelaksanaan koordinasi dan pelayanan kebijaksanaan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi social penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
4. Penyelenggaraan pelatihan sosial dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.
5. Pelaksanaan monitoring, pengawasan, evaluasi, pembinaan, dan pelaporan dibidang pelayanan sosial anak, pelayanan lanjut usia, pelayanan dan rehabilitasi sosial penyandang cacat, pelayanan rehabilitasi sosial tuna sosial, pelayanan dan rehabilitasi sosial narkoba.

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, bidang pelayanan dan rehabilitasi sosial dibantu oleh:

1. Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lanjut Usia, dan Rehabilitasi Penyandang Cacat, mempunyai tugas:

a. Meningkatkan kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan anak agar hak-hak anak terhadap pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dapat terjamin

b. Mencegah dan menghindari anak dari tindak kekerasan, perlakuan salah, eksploitasi, dan perlakuan diskriminatif yang mengakibatkan hak-hak anak menjadi tidak terpenuhi.

c. Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam menangani masalah social anak dilingkungannya.

d. Melindungi dan menjamin hak-hak penduduk lanjut usia melalui perlindungan sosial dan pemberian kemudahan dalam akses fasilitas pelayanan publik dan pelayanan sosial.

e. Meningkatkan taraf kesejahteraan sosial lanjut usia.

f. Pelayanan rehabilitasi sosial bagi penyandang cacat melalui bimbingansosial dan keterampilan kerja serta bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) secara Kelompok Usaha Bersama (KUBE) serta pengembanganbudaya kewirausahaan.

g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial, mempunyai tugas:

a. Meningkatkan fungsi sosial para tuna sosial terhadap gelandangan, pengemis, bekas narapidana, wanita tuna susila, gelandanga psykotik, waria, dan bekas anak negara agar dapat hidup dan dapat mencari nafkah sesuai dengan norma sosial masyarakat Indonesia melalui bimbingan sosial dan keterampilan kerja serta bantuan ekonomis produktif.

b. Memberikan pelayanan sosial bagi mereka yang tertular HIV/AIDS agar tetap dapat hidup produktif serta mengurangi beban sosial psykologis yang dialaminya.

c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Korban Narkoba, mempunyai tugas:

a. Memulihkan fungsi sosial korban penyalahgunaan narkoba melalui kegiatan bimbingan sosial, keterampilan kerja dan bantuan ekonomis produktif.

b) Meningkatkan ketahanan dan daya tingkat masyarakat terhadap penyalahgunaan. narkoba.

e) Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, membawahi :

1. Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial
2. Seksi Penanggulangan Korban Tindak Kekerasan
3. Seksi Bantuan Fakir Miskin dan Jaminan Sosial

f) Bidang Pengembangan Sosial, membawahi :

1. Seksi Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial
2. Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial
3. Seksi Kesejahteraan Keagamaan

Dalam Penelitian mengenai Evaluasi Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung, Dinas Sosial Kota Bandar Lampung memiliki perananan penting dalam hal pelaksanaan peraturan daerah ini.

1. Data Kepegawaian

Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Kota yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala walikota melalui sekertaris Daerah Kota Kedudukan dan Jabatan struktural Personil Pegawai Dinas Sosial sebanyak 20 Orang dan disajikan dalam table sebagai berikut :

Tabel 3. Personil Pegawai Dinas Sosial

NO	NAMA PEGAWAI	JABATAN
1	Drs. Akuan Effend, SH	Kepala Dinas NIP. 19600120 198903 1002
2	Drs. Netty Adriani	Sekretaris NIP. 19621118 198503 2004
3	Yulismasar Daud, SH	Bidang Pemberdayaan Sosial NIP. 19590906 198206 2002
4	Khawariah	Seksi Pendayagunaan danPeningkatan Peran Kelembagaan Sosial NIP. 19620727 199103 2002
5	Dra. Susan Takarianti	Seksi Pendayagunaan Sumber Dana Sosial NIP. 19650912 198603 2009
6	Manondang, S.Pd	Seksi Kepahlawanan Keperntisan dan Keperjuangan NIP. 19590611 198603 2002
7	Drs. Muzairin Daud	Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial NIP. 19660619 199111 100160
8	Evazati S.Sos	Seksi Pelayanan Sosial Anak, Lansia dan Rehabilitasi Penyandang Cacat NIP. 19660610 199102 2 002
9	Suheri S.Sos	Seksi Pelayanan Rehabilitasi Tuna Sosial

		NIP. 19690101 199803 1014
10	Dra. Mega Suri Rivai	Seksi Pelayanan dan Rehabiltasi Korban Narkoba NIP. 19600827 198503 2005
11	Santoso Adhy S.SE.MM	Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial NIP. 19680916 199703 1001
12	Fery Hartawijaya. SH	Seksi Bantuan Sosial Korban Bencana Alam
13	Dra. Mega Suri Rivai	Seksi Korban Tindak Kekerasan NIP. 19590618 198811 2001
14	Elvira Yusna M. S.sos	Seksi Bantuan Sosial Fakir Miskin dan Jaminan Sosial NIP. 19700123 199503 2002
15	Drs. Ertati, MM	Kepala Bidang Pengembangan Sosial NIP. 19580331 19840332 002
16	Junaidi	Seksi Penelitian dan Penyuluhan Kesejahteraan Sosial NIP. 19580304 198303 1013
17	Herry Purwanto	Seksi Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial NIP. 19690101 199803 1014
18	Sriwati, SP	Seksi Kesejahteraan Keagamaan NIP. 19690611 199203 2004
19	Lily Halida, SE.MM	Sub Bagian Keuangan NIP. 19740925 199603 2001
20	Dra. Hj. Faridah	Sub Bagian Umum dan Kepegawaian NIP. 19660426 199203 2002

Sumber : Data Kepegawaian Dinas Sosial Kota Bandar Lampung Tahun 2015

C. Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP Kota Bandar Lampung adalah bagian perangkat daerah dalam penegakkan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Ketentraman dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis

yang memungkinkan pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teratur.

a. Kedudukan

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat daerah dibidang penegakan Peraturan Daerah, Ketertiban Umum, Ketentraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung

Berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang tugas, fungsi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandar Lampung tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja menegakkan Peraturan Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

a) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat

b) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

c) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah

d) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat

e) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil daerah, dan atau aparatur lainnya

f) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur daerah atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota

g) Pelaksanaan pelayanaan teknis kesekretariatan Satpol PP

h) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam menangani masalah prostitusi dan untuk membantu Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam menjalankan Peraturan Daerah No.15 Tahun 2002, tugas Satpol PP adalah melaksanakan penertiban terhadap pelaku-pelaku prostitusi seperti PSK, yang mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung. peneliti menyimpulkan bahwa pelaksanaan Perda tersebut berjalan kurang maksimal. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa indikator yang masih belum terpenuhi dan mengalami beberapa hambatan seperti :

1. Efektivitas

Berdasarkan dimensi efektivitas bahwa Pelaksanaan Peraturan daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung belum efektif. Hal ini bisa dilihat dari jumlah pelaku prostitusi atapun aktivitas prostitusi yang belum berkurang secara maksimal terlebih bila dilihat dari lamanya perda ini dikeluarkan. Selain itu pemahaman isi akan Peraturan Daerah belum banyak diketahui baik dari masyarakat umum maupun penyandang masalah sosial tersebut hal ini dikarenakan kurang maksimalnya pihak pelaksana dalam melakukan Sosialisasi, Penertiban, dan juga Pengawasan.

2. Efisiensi

Mengenai efisiensi peneliti mengukur berdasarkan beberapa sub indikator :

a. Efisiensi output: jika dengan tingkat input yang sama, diperoleh tingkat output lebih tinggi, maka terjadi efisiensi *(output).*

   Penambahan anggota Satpol PP dalam menertibkan perbuatan prostitusi berjalan baik tetapi hasil yang diharapkan belum tercapai dengan maksimal,

dengan kata lain efesiensi output belum maksimal bila dibandingkan dengan peningkatan input.

b. Efisiensi input: jika untuk mencapai tingkat output yang sama dapat digunakan tingkat input yang lebih sedikit, maka terjadi efisiensi *(input).*

Dalam penggunaan sumber daya masih kurang maksimal oleh Instansi pelaksana Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 dan sumber dana yang ada sudah seefisien mungkin digunakan untuk pembinaan walaupun tidak semua pelaku prostitusi dapat dibina.

3. Kecukupan

Bila dilihat dari kecukupan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 untuk pencapaian Peraturan Daerah belum mencukupi hal ini bisa dilihat dari ketaatan dari setiap kelompok sasaran yang dipengaruhi oleh kurang nya pengawasan dan sosialisasi, namun kecukupan pada metode yang digunakan untuk pembinaan sudah menunjukkan hasil seperti yang diharapkan pihak pelaksana pembinaan.

4. Perataan

Mengenai indikator perataan peneliti menyimpulkan ketidak merataan mengenai sosialisasi, pengawasan, monitoring, maupun pembinaan oleh Dinas Sosial Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan peraturan daerah belum bisa dirasakan oleh semua kalangan baik masyarakat maupun para penyandang masalah sosial tersebut.

5. Responsivitas

Kesimpulan peneliti mengenai Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 kurangnya responsivitas terdapat pada masing-masing sektor dan kelompok sehingga menghambat dari pelaksanaan peraturan daerah baik dari segi pemenuhan anggaran, respon masyarakat yang mendukung pelaksanaan peraturan daerah ini, dan respon para penyandang masalah sosial akan kurangnya pemahaman tentang Peraturan Daerah akibat sosialisasi yang kurang maksimal.

6. Ketepatan

Peneliti menyimpulkan mengenai ketepatan yang dibagi menjadi tiga sub fokus oleh peneliti yaitu ketepatan dari fungsi perda, ketepatan pada penetapan target sasaran dan juga ketepatan pada manfaat perda. Pada ketepatan fungsi, target sasaran dan ketepatan manfaat sudah sesuai dengan tujuan Peraturan Daerah.

B. Saran

Berdasarkan kendala-kendala dan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan Peraturan Daerah No. 15 Tahun 2002 Tentang Larangan Perbuatan Prostitusi di Kota Bandar Lampung maka peneliti memberikan saran yang didasarkan pada masalah-masalah yang telah ditemukan dari penelitian yang telah dilakukan peneliti, berikut saran-sarannya :

a) Pelaksanaan sanksi tegas bagi pelaku prostitusi maupun pengguna jasa prostitusi.
b) Sosialisasi yang merata kesetiap sudut Kota Bandar Lampung, terutama yang banyak terdapat aktivitas prostitusi.

c) Dinas Sosial melakukan penyuluhan maupun pelatihan khusus kepada kelompok-kelompok yang mengalami permasalahan sosial.

d) Dinas Sosial Kota Bandar Lampung melaksanakan sanksi tegas sesuai dengan isi dalam perda kepada setiap kelompok atau individu yang membandel dengan syarat apabila individu atau kelompok tersebut sudah sering terjaring penertiban dan sudah diberikan pembinaan lalu masih kembali melakukan perbuatan prostitusi.

e) Menyediakan layanan pengaduan apabila masyarakat mengetahui ada perbuatan prostutusi di lingkungan sekitar mereka atau tempat-tempat tertentu.

f) Melakukan pembinaan bukan hanya secara mental tapi juga keterampilan.

g) Melakukan pengawasan dan monitoring yang berkesinambungan kesetiap individu maupun kelompok yang sudah diberikan pembinaan dan keterampilan melalui pendekatan kekeluargaan oleh Dianas Sosial Kota Bandar Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Purnomo, Tjahjo. 1985. Dolly,Membedah Dunia Pelacuran Surabaya, *Kasus Kompleks Pelacuran Dolly*. Jakarta:Grafitipers.

An-Nabhani, Taqiyuddin. 2006. *Konsepsi Politik Hizbut Tahrir*, Jakarta:Hizbut Tahriri Indonesia.

Wahab, Solichin Abdul.2008. *Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta:PT.Bumi Aksara.

Nugroho, Riant. 2011.*Public Policy*. Jakarta:Elex Media Komputindo.

Winarno, Budi. 2012. Kebijakan *Publik:Teori,Proses dan Studi Kasus.* Yogyakarta:CAPS

Jones, Charles O. 1984. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy).* Jakarta: Rajawali Pers.

Bryant, Coralie dan White Louise,G. 1987. *Manajemen Pembangunan Untuk Negara Berkembang*. Jakarta:LP3ES.

Dunn, William. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik edisi kedua*. Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.

Islamy, M Irfan. 2003. Prinsip-*prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.

Wibawa, Samodra. Pusbokusuma. Yuyun Pramusint.,Agus. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta:Rajawali Pers.

D, Riant Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik*. Jakarta:PT Elex Media Komputindo.

Huda, Ni`matul. 2009. *Hukum Peraturan Daerah*. Bandung:Nusa Media.

Ekatjahjana, Widodo. 2008. *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan: Dasar-dasar Dan Teknik Penyusunannya*. Bandung:Citra Aditya Bakti

Koentjoro. 2004. *ON THE SPOT:Tutur dari Sarang Pelacur.*Yogyakarta:Tinta

Kartono, Kartini. 1992. *Patologi Sosial*. Jakarta:Rajawali Pers.

Basrowi dan Suwandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.

Moleong, Lexi. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:Remaja Rosdakarya

Miles, Methew B dan Michel A Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif.* Jakarta:Universitas Indonesia Press.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi.* Bandung:Alfabeta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan.

Undang-Undang No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Perundang-undangan

Website

http://hizbut-tahrir.or.id/2013/02/13/negeri-darurat-pelacuran-dan-seks bebas/diakses pada tanggal 13 Februari 2013

http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/hukum-pidana/684-eksploitasi-seksual-komersial-mengintai-anak-kita.html diakses pada tanggal 18 Agustus 2010

https://www.mail-archive.com/ppiindia@yahoogroups.com/msg08710.html diakses pada tanggal 2 Desember 2004

http://www.lampung.antaranews.com/berita/330597/pekerja-seks-anak-di-eks-lokalikasi-panjang diakses pada tanggal 1 September 2012

http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/14984/1/HUTWATUL%20FAUZIYAH-FSH.pdf diakses pada tahun 2009

(www.bandarlampung.go.id diakses pada 23 Maret 2015)

http://www.kebijakanaidsindonesia.net/id/dokumen-kebijakan

http://digilib.unila.ac.id/9232/

http://lampung.bkkbn.go.id/_layouts/mobile/dispform.aspx?List=8c526a76%2D8b88%2D44fe%2D8f81%2D2085df5b7dc7&View=69dc083c%2Da8aa%2D496a%2D9eb7%2Db54836a53e40&ID=15

https://lampungpro.com/post/513/pol-pp-bandar-lampung-jaring-13-psk